

Pembinaan Pemahaman Hukum bagi Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025

A. Latar Belakang

Pembinaan Pemahaman Hukum bagi Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam menanamkan kesadaran dan kepatuhan hukum sejak usia dini. Remaja merupakan kelompok usia yang rentan terhadap berbagai permasalahan sosial, seperti bullying, penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Oleh karena itu, diperlukan pembinaan yang terarah dan berkelanjutan agar siswa memiliki pemahaman hukum yang memadai sebagai bekal dalam kehidupan bermasyarakat.

Melalui kegiatan ini, siswa diharapkan mampu mengenali bentuk-bentuk pelanggaran hukum, memahami dampak hukum dan sosial dari perilaku menyimpang, serta menumbuhkan sikap disiplin dan bertanggung jawab. Kegiatan Pembinaan Pemahaman Hukum bagi Siswa SMP juga mendukung upaya pencegahan dini terhadap tindak kenakalan remaja dan kejahatan lainnya di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Pembinaan Pemahaman Hukum bagi Siswa Sekolah Menengah Pertama Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025 dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali kegiatan dengan waktu, tema, dan sasaran yang berbeda. Seluruh kegiatan dilaksanakan di Ruang Rapat Patung Dirgantara Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan dan diikuti oleh perwakilan siswa dan guru dari berbagai SMP negeri dan swasta di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan jumlah peserta pada setiap kegiatan sebanyak 10 guru dan 90 siswa.

Kegiatan pertama dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2025 dengan tema Stop Bullying dan Narkoba. Kegiatan kedua dilaksanakan pada tanggal 11 September 2025 dengan tema Stop Narkoba dan Kesehatan Reproduksi Remaja. Kegiatan ketiga dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2025 dengan tema Stop Narkoba dan Kenakalan Remaja. Adapun kegiatan keempat dilaksanakan pada tanggal 18 November 2025 dengan tema Stop Kenakalan Remaja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Setiap kegiatan dibuka oleh pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan dan dihadiri oleh unsur Suku Dinas Pendidikan Wilayah I serta Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Materi pembinaan disampaikan oleh narasumber yang kompeten dan berasal dari berbagai instansi terkait, antara lain Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Materi yang disampaikan mencakup pencegahan bullying, dampak dan sanksi hukum bullying, bahaya penyalahgunaan narkotika, kesehatan reproduksi remaja, kenakalan remaja, cyberbullying, serta pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang. Penyampaian materi dilakukan melalui metode pemaparan, diskusi interaktif, dan tanya jawab agar siswa lebih mudah memahami substansi yang diberikan.

Sasaran kegiatan Pembinaan Pemahaman Hukum bagi Siswa SMP adalah siswa-siswi tingkat SMP di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang diwakili oleh 10 (sepuluh) sekolah pada setiap pelaksanaan kegiatan. Selain siswa, kegiatan ini juga melibatkan guru pendamping sebagai mitra dalam menindaklanjuti materi pembinaan di lingkungan sekolah masing-masing. Dengan keterlibatan guru dan siswa secara bersamaan, diharapkan materi pembinaan dapat berkelanjutan dan diimplementasikan secara efektif di sekolah.

C. Hasil dan Evaluasi Kegiatan

Pelaksanaan Pembinaan Pemahaman Hukum bagi Siswa SMP memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum peserta. Siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai bentuk-bentuk pelanggaran hukum, risiko dan dampak perilaku menyimpang, serta pentingnya menjaga perilaku sesuai norma hukum dan sosial. Kegiatan ini juga mendorong terbentuknya sikap kritis dan berani menolak perilaku negatif, seperti bullying, penyalahgunaan narkotika, dan pergaulan bebas.

Berdasarkan hasil pre-test dan post-test pada seluruh pelaksanaan Pembinaan Pemahaman Hukum bagi Siswa Sekolah Menengah Pertama Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025, terdapat peningkatan nilai rata-rata pemahaman peserta pada setiap kegiatan. Nilai pre-test yang semula berada pada kisaran 68,45 hingga 85,88 meningkat pada hasil post-test menjadi 86,80 hingga 91,90, yang menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa terhadap materi hukum yang disampaikan, meliputi pencegahan bullying, penyalahgunaan narkotika, kesehatan reproduksi remaja, kenakalan remaja, cyberbullying, serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO), sehingga kegiatan ini dinilai efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum siswa sejak dini.

Melalui pembinaan yang dilaksanakan secara berkelanjutan, diharapkan siswa SMP di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan mampu menjadi generasi

muda yang sadar hukum, berkarakter, dan berkontribusi positif dalam menciptakan lingkungan sekolah dan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan.

